



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *Alhamdulillahirabbil'alamin* kami panjatkan kehadirat Allah Subhahuwata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat menyelesaikan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersusun dalam berbagai tujuan, sasaran kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan perencanaan kinerja seluruh kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja ini merupakan tugas yang sangat penting dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja yang dipaparkan merupakan rencana Perangkat Daerah pada satu tahun ke depan dengan memperhatikan berbagai macam kebutuhan masyarakat, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dari OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Saran, masukan bahkan kritik yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini dikemudian hari.

Dengan adanya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak melenceng dari perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT., selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua.

Tarempa, 18 Juli 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2022	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..	14
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	10
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
Tabel T-C.31	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas.....	18
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	29
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja	31
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	33
Tabel 4.1.	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2024.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan dari masing-masing perangkat daerah untuk periode satu tahun. Hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut mengenai dasar dari tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. RENJA sendiri merupakan penjabaran dari RENSTRA perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 hakikatnya dapat mempermudah setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahunan pada RENSTRA perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing perangkat daerah. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual perangkat daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target

pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Di dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan di dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah. Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, RENJA Perangkat Daerah juga memuat berbagai persoalan yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Usulan masyarakat tersebut terjaring pada saat berlangsungnya Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang dikenal dengan istilah MUSRENBANG, yang pelaksanaannya di mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Di dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setia Perangkat Daerah, yang disusun sesuai berpedoman kepada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan pagu indikatif merupakan anggaran yang tersedia untuk mendanai berbagai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 yang merupakan wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa dokumen perencanaan tahunan. Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang

telah ditetapkan sesuai dengan RENSTRA Perangkat Daerah sebagai manifestasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Dokumen Rancangan Akhir RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024. Selain itu, RENJA pada Perangkat Daerah ini harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2024 serta bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dan harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan Rancangan Akhir RENJA Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Darah, Taca Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Taca Cara Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veerifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 – 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir RENJA ini adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah :

- a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam RENSTRA sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara khusus RENJA ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Menjadikan RENJA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;
- d. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir RENJA Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan dan dibagi ke dalam empat BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi RENJA, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022

Pada BAB ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan RENJA Perangkat Daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian ketiga dalam dokumen RENJA ini akan dikemukakan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB penutup menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanaan kegiatan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing program dan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas dengan membandingkan target kinerja dengan capaian kinerja yang diraih.

Mengacu pada anggaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022, selama periode tersebut Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 3 Program dan 11 Kegiatan, dengan realisasi fisik sebesar **100%** dan realisasi keuangan mencapai **98,24%** atau sebesar **Rp.15.422.698.458,00** dari total anggaran yang dikelola selama tahun 2022 yaitu sebesar **Rp.15.699.524.860,00**.

Untuk tahun 2023, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas, anggaran yang dibebankan kepada Satpol adalah sebesar **Rp.15.275.092.278,00** yang terdiri dari 2 program dan 11 kegiatan.

Mengacu kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, jumlah yang dianggarkan didalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2026 adalah sebesar **Rp.136.277.678.298,00**. Dari total anggaran tersebut, jumlah yang sudah dianggarkan sampai dengan tahun 2023 dengan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021, 2022 dan tahun 2023, adalah sebesar **Rp.48.798.710.975,00** dengan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan tahun 2023 sebesar **Rp.46.119.785.538,00** atau sebesar **33,84%** dari total anggaran Renstra yang dialokasikan sampai dengan tahun 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun lalu dan Capaian Renstra Satpol PP dalam hal anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.29. berikut:

Tabel T-C.29.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) / (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) / 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun (n-1) / 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		136.277.678.298	17.057.597.059	15.699.524.860	15.422.698.458	98,24	15.275.092.278	46.119.785.538	33,84
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.175.189.801	14.622.505.892	15.224.746.060	14.948.469.658	98,19	14.547.177.978	44.118.153.528	44,04
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	729.672.000	50.828.220	61.838.059	61.660.000	99,71	36.218.500	148.706.720	20,38
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	35.956.215.611	5.064.477.157	5.704.247.831	5.582.774.153	97,87	5.738.142.584	16.385.393.894	45,57
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan	414.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	108.000.000	26,09

1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaiyan yang Terselesaikan	3.115.050.650	713.732.800	0	0	0,00	1.016.982.200	1.730.715.000	55,56
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	5.138.337.681	492.689.453	729.983.578	655.791.359	89,84	685.243.000	1.833.723.812	35,69
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	13.562.643.709	658.350.000	558.431.500	558.431.500	100,00	632.517.600	1.849.299.100	13,64
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.918.082.500	7.509.023.162	7.993.309.122	7.924.277.196	99,14	6.313.306.564	21.746.606.922	54,48
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.341.187.650	97.405.100	140.935.970	129.535.450	91,91	88.767.530	315.708.080	23,54
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Terselesaikan	31.710.049.857	871.796.220	402.471.490	401.921.490	99,86	727.914.300	2.001.632.010	6,31
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada								
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	20.357.530.057	306.236.620	226.097.240	225.747.240	99,85	565.597.700	1.097.581.560	5,39
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	8.997.695.800	436.966.400	76.374.250	76.174.250	99,74	71.816.600	584.957.250	6,50
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif	2.354.824.000	128.593.200	100.000.000	100.000.000	100,00	90.500.000	319.093.200	13,55

1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran	4.392.438.640	1.563.294.947	72.307.310	72.307.310	100,00	0	0	0,00
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran								
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	2.681.585.000	765.873.074	72.307.310	72.307.310	100,00	0	0	0,00
1.05.04.2.02	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran yang diinspeksi	75.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1.05.04.2.03	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi	30.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1.605.853.640	797.421.873	0	0	0,00	0	0	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perlu disampaikan disini bahwa sampai dengan bulan Oktober 2022, sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja masih menjadi perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran dan nomenklatur perangkat daerah masih bernama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dan sesuai Surat Bupati Kepulauan Anambas nomor 481/Kdh.KKA.060/10.2022 tanggal 31 Oktober 2022, telah dilakukan pemisahan beberapa perangkat daerah termasuk Satpol PP, yang sesuai dengan surat tersebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan nomenklatur perangkat daerah berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, sementara Sub Urusan Pemadam Kebakaran sudah diampu langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Begini juga dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, seiring dengan perubahan perangkat daerah, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah dilakukan penyesuaian, sehingga Sub urusan kebakaran yang sebelumnya masih menjadi salah satu indikator kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka indikator kinerja tersebut juga sudah tidak lagi menjadi beban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga tidak ditampilkan lagi dalam Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbub, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Mengacu kepada Indikator Kinerja Program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 terdapat 3 Sasaran Strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil evaluasi, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai.

Dari keempat target indikator kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masih dibawah target. Untuk tahun 2022 ditargetkan BB (68,00), dengan nilai capaian B (67,31). Hal ini disebabkan karena masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dan pemahaman aparatur akan arti penting Akuntabilitas dalam penyelenggaraan organisasi.

Sementara untuk Indeks Reformasi Birokrasi merupakan kolaborasi hasil penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan terhadap Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini.

Tabel T-C.30.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi			B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	B (69,00)	CC (54,27)		B (69,00)	B (69,00)	
2.	Nilai Predikat AKIP			B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (74,00)	B (67,31)		BB (74,00)	BB (74,00)	
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan			86%	88%	90%	92%	86%		90%	92%	
4.	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3			86%	88%	90%	92%	86%		90%	92%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian, dan sangat berpengaruh dalam upaya pencapaian kinerja terkait tugas dan fungsi tersebut. Isu-isu tersebut harus dirumuskan secara cermat guna mengidentifikasi permasalahan dan

solusi serta proses pelaksanaan dari Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun beberapa isu strategis yang teridentifikasi adalah :

a. Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu isu yang diangkat oleh pemerintah daerah untuk tahun 2024, dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggaran sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam pemenuhan hak anak. Kondisi lingkungan dan masyarakat yang tertib dan tentram serta perlindungan terhadap anak merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan perkembangan anak.

b. Kabupaten Kota Sehat.

Lingkungan yang sehat merupakan dambaan dari setiap manusia, dan merupakan salah satu faktor pendukung upaya meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan masyarakat.

c. Pengarusutamaan Gender.

Gender merupakan salah satu isu nasional yang sampai saat ini menjadi salah satu prioritas dan pembangunan nasional dalam meningkatkan peran dan fungsi sumber daya manusia dalam pembangunan.

d. Pencegahan Stunting.

e. Inovasi Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan adanya inovasi yang kreatif dan efektif agar pelayanan tersebut dapat berlangsung secara maksimal, efektif dan efisien dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Disamping beberapa isu diatas, juga terdapat beberapa isu internal yang juga perlu mendapat perhatian adalah seperti:

a. Pembinaan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan, guna meningkatkan kinerja aparatur dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat. Diperlukan adanya standarisasi kualifikasi aparatur sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara cepat, tepat dan mengena sesuai maksud dengan dan tujuan yang telah ditetapkan;

- b. Pengawasan swakarsa yang ada dalam masyarakat, baik yang kemunculannya atas inisiasi perangkat daerah maupun atas inisiatif masyarakat sebagai perpanjangan tangan dalam mengemban tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Terhadap pengawasan swakarsa ini diperlukan adanya pengaturan baik terhadap kegiatan penjagaan, pengawasan dan patroli serta kegiatan lain sehingga tidak menimbulkan benturan yang justru dapat menyebabkan terganggunya upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan teratur.
- c. Minimnya anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Satuan Polisi Pamong Praja sehingga berakibat pada program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat berjalan dengan optimal.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja tentunya tidak terlepas dari Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengemban upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Beberapa isu mendasar seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemulihan dan pembangunan ekonomi, upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pemenuhan utilitas dasar seperti listrik dan air bersih merupakan permasalahan yang menjadi skala prioritas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tahun 2024.

Dalam rangka penyelarasan kebutuhan perangkat daerah, telah dilakukan perbandingan dari rencana kebutuhan yang mengacu kepada dokumen Renstra Satpol PP tahun 2021-2026 untuk kebutuhan tahun 2024. Keterbatas anggaran dan adanya usulan yang muncul dari pimpinan dan legislatif menjadi salah satu isu penting yang mengakibatkan adanya beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang harus disesuaikan, sehingga terdapat beberapa anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang harus disesuaikan.

Proses penyesuaian terhadap anggaran dan indikator tersebut perlu dilakukan guna menjamin pencapaian target kinerja dan anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah untuk tahun 2024.

Adapun hasil review terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel T-C.31. berikut:

Tabel T-C.31
Reviu terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	13.905.922.194	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	21.237.285.194	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun		100%	66.223.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun		100%	145.696.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	10 Dokumen	20.574.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	10 Dokumen	58.715.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	1.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	2.820.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	1.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	2.820.000	

No	RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	1.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	2.820.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	1.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	2.820.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	1.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	16.974.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja yang terlaksana	Kab. Kepulauan Anambas	4 Laporan	45.644.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja yang terlaksana	Kab. Kepulauan Anambas	4 Laporan	58.727.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan		100%	5.738.146.584	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan		100%	6.354.472.336	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas	33 Orang / Bulan	5.577.833.084	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas	33 Orang / Bulan	6.152.577.636	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	70 Dokumen	156.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	70 Dokumen	160.920.000	

No	RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	1.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	10.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	4.309.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	10.774.700	
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	1.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	5.250.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	18 Laporan	1.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	18 Laporan	9.450.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	1.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	5.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan		100%	36.002.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan		100%	86.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	1.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	5.000.000	

No	RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	1.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	5.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	36.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	76.000.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan		100%	300.003.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan		100%	631.146.650	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kepulauan Anambas	10 Paket	1.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kepulauan Anambas	10 Paket	250.000.000	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	1.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	16.146.650	
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kepulauan Anambas	4 Dokumen	1.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kepulauan Anambas	4 Dokumen	5.000.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kepulauan Anambas	11 Orang	300.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kepulauan Anambas	26 Orang	360.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan		100%	648.291.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan		100%	1.035.000.000	

No	RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kepulauan Anambas	9 Paket	5.337.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kepulauan Anambas	9 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	9 Paket	88.390.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	9 Paket	210.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	15 Paket	12.564.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	15 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12 Paket	102.472.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12 Paket	150.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12 Paket	20.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	1.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	55.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Paket	1.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Paket	20.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	1.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	50 Laporan	429.523.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	50 Laporan	500.000.000	

No	RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	1.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Dokumen	20.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	441.720.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	6.050.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Unit	1.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	1.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	300.000.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	10 Unit	1.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	10 Unit	200.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Unit	1.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Unit	150.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	441.714.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	5.000.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	1.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	150.000.000	
	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana	Kab.	1 Unit	1.000	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana	Kab.	1 Unit	50.000.000	

No	RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kepulauan Anambas			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kepulauan Anambas			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	6.577.068.180	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	6.669.970.208	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12 Laporan	72.452.220	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12 Laporan	87.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12 Laporan	1.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12 Laporan	100.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12 Laporan	6.504.614.960	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12 Laporan	6.482.970.208	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90%	98.467.530	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90%	265.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kepulauan Anambas	20 Unit	78.167.530	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kepulauan Anambas	20 Unit	155.000.000	

No	RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas	15 Unit	20.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas	15 Unit	35.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	75.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Terselesaikan		90%	893.465.596	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Terselesaikan		90%	5.809.292.997	
		Percentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada		100%			Percentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada		100%		
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti		90%	430.290.996	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti		90%	3.609.292.997	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Kepulauan Anambas	35 Kasus	184.435.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Kepulauan Anambas	35 Kasus	650.000.000	

No	RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Kepulauan Anambas	35 Kasus	111.941.000	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan perda dan Perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Kepulauan Anambas	35 Kasus	350.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	15 Dokumen	1.000	Koordinasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	15 Dokumen	350.000.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kepulauan Anambas	15 Dokumen	100.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kepulauan Anambas	15 Dokumen	650.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kepulauan Anambas	350 Orang	1.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kepulauan Anambas	350 Orang	500.000.000	

No	RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokume Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kepulauan Anambas	12 Dokumen	33.909.996	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokume Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kepulauan Anambas	12 Dokumen	200.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Kepulauan Anambas	60 Unit	1.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Kepulauan Anambas	60 Unit	459.292.997	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkhan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkhan	Kab. Kepulauan Anambas	10 Dokumen	1.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkhan	Kab. Kepulauan Anambas	10 Dokumen	100.000.000	
	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Kepulauan Anambas	35 Laporan	1.000	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Kepulauan Anambas	35 Laporan	350.000.000	
	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani		90%	250.174.600	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani		90%	1.700.000.000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	Kab. Kepulauan Anambas	30 Laporan	85.419.500	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	Kab. Kepulauan Anambas	30 Laporan	500.000.000	

No	RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kepulauan Anambas	30 Laporan	133.945.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kepulauan Anambas	30 Laporan	600.000.000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Sesuai SOP	Kab. Kepulauan Anambas	3 Laporan	30.810.100	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Sesuai SOP	Kab. Kepulauan Anambas	3 Laporan	600.000.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif		50%	213.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif		50%	500.000.000	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penigkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Kab. Kepulauan Anambas	3 Laporan	213.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penigkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Kab. Kepulauan Anambas	3 Laporan	500.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sampai dengan tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2024, agenda besar nasional adalah Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang melaksanakan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, maka hal tersebut menjadi perhatian khusus dari perangkat daerah dalam rangka menyukseskan gawai nasional tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut persiapan sudah dilakukan sejak tahun 2023, yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dan peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk tahun 2024, hal tersebut terus berlanjut dengan lebih berfokus kepada upaya pengamanan dan pembinaan ketertiban dalam masyarakat guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif guna menyukseskan kegiatan tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas seperti yang dikemukakan sebelumnya, sejatinya visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Selanjutnya, tujuan yang akan diwujudkan tersebut dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas ini menggambarkan berbagai kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Adapun Tema Pembangunan pada RKPD 2024 yaitu “Penguatan Sumber Daya Manusia, Ketahanan Ekonomi, serta Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Transparan”. Sementara Prioritas RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Pengembangan dan pemantapan sumber daya ekonomi dan investasi daerah;
3. Peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, keamanan dan keetertiban di masyarakat.

Tujuan dan sasaran Renja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu **“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhhlakul Karimah”**. Visi tersebut dapat dicapai melalui penerapan tujuh misi. Dari ketujuh misi tersebut, ada dua poin yang menjadi sasaran pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, dan hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78,00)

2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	85%	86%	88%	90%	92%	95%
		Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Percentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	85%	86%	88%	90%	92%

Sumber: Renstra 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lebih menitikberatkan pada penegakan Peraturan Daerah dan Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan faktor berikut:

1. Tegaknya Perundangan Daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Agenda nasional terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2024. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan dan Kebijakan Daerah, berbanding lurus dengan tersedianya anggaran. Berikut rencana program/kegiatan/sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHU
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

**KABUPATEN
KEPULAUAN
ANAMBAS**

NAMA
**PERANGKAT
DAERAH :
SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					14.799.388.790		
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			14.799.388.790				
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	13.905.923.194			
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	Kab. Kep. Anambas	100	66.223.500	DAU		
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	Persen	100	5.738.146.584			
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan	Persen	100	36.002.000			
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Persen	100	300.003.000			

1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Persen	100	648.291.400	
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	441.720.000	
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	6.577.068.180	
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	90	98.468.530	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Terselesaikan	Persen	90	893.465.596	
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	100		
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	90	430.290.996	
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	Persen	90	250.174.600	
1.05.02.2.03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif			

TABEL RENJA DI SIPD.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						14.799.388.790,00									25.520.237.437,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.799.388.790,00									25.520.237.437,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.799.388.790,00									25.520.237.437,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	13.905.923.194,00							-	18.015.452.775,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	-			100 Persen	66.223.500,00				-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP	-	165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	20.574.500,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP			65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keteribatan di Masyarakat	OPD Satpol PP		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	45.644.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keteribatan di Masyarakat	OPD Satpol PP		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	-			100 Persen	5.738.146.584,00			-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keteribatan di Masyarakat	OPD Satpol PP	-	6.671.626.517,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					33 Orang/bulan	5.577.833.084,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomia n Daerah Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		6.460.206.517,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					70 Dokumen	156.000.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		160.920.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 Laporan	4.309.500,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomia n Daerah Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					2 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					18 Laporan	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN PERIODE RENTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan	-			100 Persen	36.002.000,00			-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keteribatan di Masyarakat	OPD Satpol PP	-	90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keteribatan di Masyarakat	OPD Satpol PP		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keteribatan di Masyarakat	OPD Satpol PP		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	36.000.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomia n Daerah Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	-			100 Persen	300.003.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomia n Daerah Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP	-	685.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomia n Daerah Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				26 Orang	300.000.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	-			100 Persen	648.291.400,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP	-	1.110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	5.337.100,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	88.390.300,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		210.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	12.564.200,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	102.472.800,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	429.523.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomia n Daerah Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomia n Daerah Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	441.720.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomia n Daerah Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP	-	2.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	441.714.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		1.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	6.577.068.180,00			-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP	-	6.703.826.258,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	72.452.220,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		90.856.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6.504.614.960,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		6.502.970.208,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			90 Persen	98.468.530,00			-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP	-	290.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	78.167.530,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	20.300.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN PERIODE RENTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP		90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Percentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	-			100 Persen 90 Persen	893.465.596,00						-	7.504.784.662,00			
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	-			90 Persen	430.290.996,00			-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat	-	5.054.784.662,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				15 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN PERIODE RENTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					350 Orang	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		795.491.665,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					5 Dokumen	33.909.996,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkhan				10 Dokumen	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				35 laporan	184.435.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				15 Laporan	111.941.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			35 Laporan	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			60 Unit	1.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		1.759.292.997,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Percentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	-		90 %	250.174.600,00			-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat	-	1.950.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN PERIODE RENTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	85.419.500,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keteribatan di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				3 Laporan	30.810.100,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keteribatan di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10 Laporan	133.945.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keteribatan di Masyarakat	OPD Satpol PP dan Masyarakat		650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Percentase PPNS yang aktif	-			50 %	213.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keteribatan di Masyarakat	OPD Satpol PP	-	500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				3 Laporan	213.000.000,00	- Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Potensi Pererekonomian Daerah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keteribatan di Masyarakat	OPD Satpol PP		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	J U M L A H						14.799.388.790,00							25.520.237.437,00				

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani bagi Perangkat Daerah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah di Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut juga dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu strategis terkait pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja, baik di level nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga diperlukan adanya sinkronisasi berbagai kebijakan pada tingkat nasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian yang membidangi sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Perda/Perkada. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah juga menjadi multak adanya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RENJA ini.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi RENJA merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar sub urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun alokasi anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 selain mengacu pada RENJA ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi RENJA ini. Semoga Rancangan Renja OPD Tahun 2024 dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RENJA ini.

Ditetapkan di : Tarempa
Tanggal : 18 Juli 2023

